

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, sehingga segala sesuatu permasalahan yang melanggar kepentingan warga negara Indonesia (WNI) harus diselesaikan atas hukum yang berlaku. Hukum diartikan sebagai seperangkat norma atau aturan yang berlaku di suatu negara. Sehingga hukum itu bersifat mengikat bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh WNI dari tingkat penyelenggara negara maupun rakyat jelata¹. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem hukum campuran dengan sistem hukum utama yaitu sistem hukum Eropa Kontinental, sistem hukum Eropa Kontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum di kodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang akan ditafsir lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya².

Bekerjanya hukum tersebut dapat dilihat dari proses penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau fungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat dilakukan salah satunya dengan memberikan perlindungan baik kepada korban dari suatu

¹ *Daftar Alamat Tempat Pejabat Negara Republik Indonesia*, 1980, Jakarta : Departemen Penerangan RI, hal. 225

² <http://id.wikipedia.org/>

perbuatan atau penganiayaan yang dideritanya maupun terhadap pelaku atas perbuatannya.

Berkaitan dengan sikap tindak atau perilaku, apabila kita melihat kekerasan yang terjadi dalam masyarakat maka akan muncul dua kekerasan yang nyata terjadi di masyarakat, yaitu kekerasan yang bersifat publik atau biasa disebut dengan kekerasan publik dan kekerasan yang bersifat domestik atau biasa disebut dengan kekerasan domestik. Kekerasan publik adalah suatu kekerasan yang dilakukan oleh kelompok atau golongan tertentu bahkan mungkin dilakukan oleh pemerintah kepada suatu kelompok atau golongan-golongan tertentu pula.³

Kekerasan domestik, adalah Kekerasan yang menunjukkan karakteristik kekerasan itu sendiri yang tidak semata-mata melihat aspek locus (tempat terjadinya perbuatan pidana), tetapi meletakkan kekerasan domestik dalam konteks penyelenggaraan hubungan sosial yang *subordinat*. Subordinat diartikan sebagai bagian yang mengubah, memperinci atau membatasi induk.⁴ Jadi subordinat diartikan menurut kalimat yang melekat pada kalimat subordinat itu sendiri. Pada penulisan skripsi ini, penulis hanya membahas mengenai kekerasan ruang lingkup domestik, jadi sesuai kalimat di atas tindak pidana yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain bisa di kategorikan sebagai kekerasan domestik. Dengan demikian, kekerasan publik lebih luas cakupannya ketimbang kekerasan domestik.

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdikbud. Hal 705.

⁴ Ibid, hal 967.

Sedangkan kekerasan domestik lebih luas cakupannya ketimbang kekerasan rumah tangga.⁵

Tindak pidana kekerasan dapat menyebabkan penderitaan yang cukup berat bagi korbannya, karena tidak hanya secara fisik saja tetapi juga dapat menyebabkan penderitaan psikologis, apabila yang melakukan tindak pidana itu adalah anggota keluarganya sendiri. Perlindungan hukum di Indonesia bagi korban tindak pidana kekerasan yang dilakukan anggota keluarga nampaknya belum bisa memberikan perlindungan bagi korban, bahkan pelaku mendapat keringanan hukuman sampai-sampai dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yaitu pasal 74 atau 63 huruf (n) menyatakan bahwa pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan jika tindak pidana yang terjadi di kalangan keluarga. Dalam hal ini terjadi kontradiktif dengan hukum positif kita yaitu kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pasal 356 ayat (1) yang menyatakan ancaman pidana ditambah sepertiga bagi yang melakukan kejahatan tersebut terhadap ibunya, bapaknya, menurut undang-undang, istrinya atau anaknya. Namun dalam prakteknya pun ternyata si pelaku justru mendapat keringanan atau pidana yang lebih ringan. Ini berarti kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dikesampingkan, walaupun kita tahu hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan dalam memutus suatu perkara.

Sejauh ini penyelesaian kekerasan domestik di kalangan masyarakat sebenarnya dalam peraturan perundang-undangan telah diatur dengan jelas

⁵ www.PemantauPeradilan.Com.

mengenai tindak pidana tersebut, yaitu pasal 356 ayat (1 dan 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), bahkan diatur pula secara khusus dalam UUPKDRT (Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Tindak pidana kekerasan domestik tidak dapat diabaikan di Indonesia karena dari kekerasan inipun dapat menimbulkan akibat yang fatal, yaitu luka-luka, memar, cacatnya salah satu anggota badan bahkan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, Meskipun belum maksimal penanggulangannya tetapi dengan adanya UUPKDRT merupakan suatu kemajuan yang pesat dalam menangani kekerasan terhadap anggota keluarga di Indonesia.

Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui sejauh mana perlindungan hukum pidana yang di berikan kepada korban tindak pidana kekerasan domestik. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis memilih judul :

“PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORBAN DAN PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DOMESTIK”.

B. Pembatasan masalah

Maksud pembatasan dalam penulisan skripsi adalah mempertegas ruang lingkup pembahasan, maka penulis akan membahas bentuk perlindungan hukum yang bagaimana yang diberikan terhadap korban dan pelaku tindak pidana kekerasan domestik dalam lingkup rumah tangga.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar peraturan perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku tindak pidana kekerasan domestik.
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan domestik yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.
3. Dan kendala-kendala yang ditempuh oleh aparat kepolisian dalam melindungi korban dan pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan obyektif
 - a. Untuk mengetahui dasar peraturan mengenai perlindungan terhadap korban dan pelaku tindak pidana kekerasan domestik dalam lingkup rumah rumah tangga.
 - b. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku tindak pidana kekerasan domestik dalam lingkup rumah tangga.
 - c. Untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam melindungi korban dan pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan jelas sebagai bahan untuk menyusun penulisan hukum, sebagai persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- b. Untuk lebih meningkatkan serta mendalami berbagai teori yang telah penulis dapatkan pada saat mengikuti perkuliahan khususnya di bidang hukum pidana.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya terutama hukum pidana.
- b. Mendapatkan masukan yang diharapkan serta dapat digunakan untuk almamater dalam mengembangkan bahan perkuliahan yang telah ada.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai adanya perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga
- b. Dapat dipakai sebagai masukan bagi pemerintah dalam hal sumbangan pemikiran hukum yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku tindak pidana kekerasan domestik.

F. Kerangka pemikiran

Hukum pidana sebagai obyek ilmu hukum pidana, pada dasarnya merupakan obyek yang abstrak, sedangkan obyek pidana yang lebih kongkrit sama dengan ilmu hukum pada umumnya, ialah tingkah laku (perbuatan) manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Hanya saja yang menjadi obyek adalah perbuatan manusia yang termasuk di dalam ruang lingkup

sasaran dari hukum pidana itu sendiri, yaitu perbuatan dari warga masyarakat pada umumnya maupun perbuatan dari penguasa atau aparat penegak hukum.⁶

Bekerjanya hukum pidana, pemberian pidana atau pemidanaan dalam arti kongkrit, yakni pada terjadinya perkara pidana, bukanlah tujuan akhir. Fungsi umum hukum pidana adalah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sementara itu, fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak merugikannya dengan menggunakan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi yang terdapat dalam bidang hukum lainnya.⁷

Hukum pidana dapat dikatakan *menyaring* dari sekian banyak perbuatan yang tercela, yang tidak susila atau yang merugikan masyarakat, sejumlah perbuatan yang dijadikan tindak pidana yang relatif kecil jumlahnya. Memang tidak mungkin semua perbuatan tercela dan sebagainya dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut sebelum memberikan ancaman pidana, yaitu: (1) tujuan hukum pidana, (2) penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki, (3) perbandingan antara sarana dan hasil dan, (4) kemampuan badan penegak hukum.

⁶ Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2005. *Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Hal. 7.

⁷ Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni Hal 21.

Dengan memperhatikan empat hal dalam hubungannya dengan persoalan kriminalitas maka dapat kita lihat bahwa penanggulangan kejahatan belum terwujud hanya dengan terbentuknya undang-undang pidana saja.

Secara yuridis, persoalan kekerasan terhadap anggota keluarga hanya mengacu pada undang-undang yang pada dasarnya menjadi hukum positif di Indonesia yaitu KUHP dan UUPKDRT. Dengan kata lain, setiap bentuk kekerasan yang dialami oleh anggota keluarga sebenarnya merupakan bentuk kejahatan yang jelas sanksi pidananya dan jelas pula pengaturannya dalam Undang-undang, dan sanksi tersebut berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan karena kedudukan kita dalam hukum adalah sama.

G. Metodologi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan hukum ini yang memenuhi kualitas, maka digunakan metode penelitian tertentu yang sesuai.

Metodologi berasal dari kata metode yang berarti “jalan ke”, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut :

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.⁸

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru, sedangkan ditinjau dari tujuannya termasuk dalam penelitian hukum empiris atau non dokrinal.⁹

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis dimanfaatkan untuk meneliti peraturan-peraturan atau aliran-aliran hukum yang berhubungan dengan.¹⁰ Hal ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku dalam tindak pidana kekerasan domestik dalam lingkup rumah tangga di wilayah Surakarta.

3. Jenis data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

⁸ Opcit. *Pengantar Penelitian Hukum (cetakan ke 3)*. 1986. Jakarta. UI Press. Hal 5.

⁹ Ibid. hal 10.

¹⁰ *Suryono Sukanto. Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia Press. 1984. Hal 42.

a. Data Primer

Merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau melalui penelitian lapangan. Dalam penulisan ini penulis melakukan interview dengan:

- 1) Korban,
- 2) Pelaku,
- 3) Aparat kepolisian,
- 4) Petugas pengadilan,
- 5) LSM-LSM

b. Data Sekunder

Adalah data atau fakta atau keterangan yang di peroleh tidak secara langsung antara lain berupa :

1. Bahan hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

- a) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- b) UU No: 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga (UUPKDRT)
- c) KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

2. Bahan hukum sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yang memberi keterangan sebagai sumber yang mendukung sumber data primer.

Yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah,

- a. Dokumen-Dokumen
- b. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta
- c. Bahan seminar
- d. Artikel-Artikel, dan
- e. Literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier

Yaitu sebagai bahan penjelas dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus, ensiklopedi hukum, dan lain-lain.¹¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data untuk berhasilnya penulisan hukum ini menggunakan metode :

a. Penelitian Lapangan

Yaitu melakukan wawancara dengan korban, pelaku, pengadilan, aparat penegak hukum beserta LSM-LSM.

b. Studi Kepustakaan

Untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, yaitu berupa data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku atau literature, tulisan ilmiah dan dokumen-dokumen maupun dari rangkuman kuliah yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

5. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan metode normatif empiris yaitu suatu analisis data yang bertitik tolak dari peraturan perundangan yang ada sebagai norma hukum positif, sedang empiris bertitik tolak pada pelaksanaan atau penerapan norma hukum positif tersebut.¹²

Metode analisis data normatif empiris dilakukan dengan cara melihat norma hukum atau perundangan yang berlaku atau yang mengatur mengenai perlindungan terhadap korban dan pelaku tidak pidana kekerasan domestik dalam lingkup rumah tangga kemudian, melihat juga apakah peraturan perundangan tersebut diterapkan dalam kehidupan di masyarakat.

H. Sistematika Skripsi

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh, maka penulis membuat sistematika skripsi, yang terdiri dari 4 (empat) bab ditambah dengan daftar pustaka, serta lampiran-lampiran. Adapun sistematika yang akan di susun adalah sebagai berikut :

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka teori, kegunaan penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹¹ Lexy J. Moleong, 1998, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remadja Rosdakarya Offset. Hal: 112.

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. Hal 229, 618.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dalam bab ini menguraikan mengenai tinjauan umum yaitu tinjauan tentang korban, pelaku, bentuk perlindungan korban dan pelaku dalam tindak pidana kekerasan domestik dalam lingkup rumah tangga, tinjauan umum tentang tindak pidana kekerasan domestik, serta kriteria-kriteria tindak pidana kekerasan domestik

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan berisi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku tindak pidana kekerasan domestik dalam lingkup rumah tangga, beberapa kasus tindak pidana kekerasan domestik dalam lingkup rumah tangga, langkah-langkah dan kendala-kendala yang dihadapi untuk mengatasi tindak pidana kekerasan domestik, dengan menggunakan data yang di peroleh dalam penelitian baik data primer dan sekunder.

PENUTUP

Berisi tentang simpulan dari hasil penelitian, beserta saran-saran yang hendak penulis sampaikan menjadi penutup dari skripsi ini.
